

EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur

Yeremia Oktavianus Ngaga¹, Gunthar Riady², Burhanuddin³

Abstrak

Penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur). Narasumber dalam penelitian ini yaitu Aparatur Desa Karya Bhakti dan Masyarakat Desa Karya Bhakti. Analisis data menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data interaktif berupa pengumpulan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur) belum efektif karena ditemui adanya hambatan yang diakibatkan oleh Aparatur Desa yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1. Kesiagaan dari Aparatur Desa Karya Bhakti belum efektif dalam menjalankan roda pemerintahan dikarenakan aparatur desa mengalami keterlambatan masuk kantor, 2. Kemangkiran, Aparatur Desa Karya Bhakti belum maksimal atau efektif dalam menjalankan tugas, dikarenakan masih banyak yang melakukan mangkir atau bolos kerja, 3. Semangat Kerja, belum efektif, selama menjadi aparatur desa gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan, dalam hal ini yang membuat semangat kerja mulai berkurang, 4. Motivasi Aparatur Desa Karya Bhakti mulai efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, aparatur Desa selama ini memiliki motivasi yang cukup baik, 5. Kepuasan Kerja Aparatur Desa belum efektif masyarakat merasa kurang puas karena lambat dalam proses pelayanan dan juga sering mangkir atau bolos kerja, 6. Beban kerja Aparatur Desa Karya Bhakti belum efektif, dikarenakan pemerintah terhambat oleh gaji yang mereka dapatkan, mangkir atau bolos kerja karena mengurus kebun mereka dan hasilnya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari, 7. Waktu, Aparatur Desa belum efektif dalam proses pelayanan kepada masyarakat Desa Karya Bhakti.

Kata Kunci : *efektivitas, kinerja, aparatur desa.*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yeremiaoktavianusngaga@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara kesatuan, dan Negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat pada era saat ini membuka jalan bagi disetiap daerahnya sendiri wujud dari demokrasi dalam pemerintahan, adanya asas desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam sistem Pemerintah Indonesia, selain otonomi daerah terdapat juga otonomi desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pemerintah desa yaitu menyelenggarakan pemerintahannya, seperti: pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan layanan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hak sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Aparatur desa harus sesuai dengan pedoman yaitu konstitusi atau undang-undang yang telah dibuat untuk mengelola dan menangani urusan desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Perangkat aparatur desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat aparatur desa adalah Sekretaris desa, yang diisi dari (PNS) Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris desa diangkat oleh Ssekretaris daerah kabupaten atau kota atas nama Bupati atau Walikota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa, amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan yang diatur dan diurus desa semakin luas yaitu meningkatnya sumber pendapatan dari pemerintah. Untuk itu diperlukan regulasi yang mengatur pengelolaan pemerintahan desa, mulai dari pemilihan Kepala Desa, dan pengisian aparatur desa. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidupnya

Kerangka Dasar Teori

Efektivitas

Menurut Sedarmayanti (2006:61), Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang

memberikan gambaran seberapa jauh target yang telat ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya didalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.

Konsepsi efektivitas banyak dijumpai baik literatur ataupun jurnal ilmiah. Definisi mengenai konsepsi efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli pun beragam. Sedarmayanti (2014) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian kerja yang maksimal, artinya pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Menurut Sedarmayanti (2009:59) mendefinisikan konsep Efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut Campel yang dikutip Ricard M, Steers (1998:45) untuk mengukur Efektivitas kerja ada beberapa variable yang biasa dipergunakan yaitu:

Kesiagaan, Merupakan suatu Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus dengan baik jika diminta.

Kemangkiran, Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan.

Semangat kerja, Kecendrungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi termasuk perasaan terikat. Semangat kerja adalah gejala kelompok yang melibatkan kerja sama dan perasaan memiliki

Motivasi, Kecendrungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan, ini bukanlah perasaan senang yang relative terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

Kepuasan kerja, Merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dan organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka.

Beban pekerjaan, Yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.

Waktu, Yang dibutuhkan untuk Menyelesaikan suatu tugas dalam hal ini Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota organisasi.

Efektivitas merupakan suatu symbol yang tidak pernah hilang dari pribadi seseorang maupun lingkungan organisasi, sehingga dalam ini perumusan efektivitas kerja perlu ditelaah juga pengertian kerja itu sendiri.

Setiap pekerjaan dari setiap individu pegawai dalam organisasi akan ikut menentukan bagi tercapainya hasil kegiatan organisasi yang telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu faktor efektivitas kerja banyak dipengaruhi oleh kemampuan orang-orang atau organisasi dalam mencapai tujuannya.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tidak dapat melepaskan diri dari perlunya pembagian kerja yang tepat supaya setiap pegawai bisa melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Pengukuran efektivitas kerja yang penulis lakukan berdasarkan banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut, sehingga dari kedua hal tersebut dapat disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi sehingga menghasilkan efektivitas kerja sebagaimana diharapkan.

Pengukuran efektivitas berdasarkan banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut dapat berarti bahwa bila tugas yang dibebankan kepada pegawai sedikit, sementara jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut lebih banyak maka akan terjadi banyak pegawai yang menganggur sehingga menjadi tidak efektif.

Sebaliknya jika tugas yang dibebankan banyak sedangkan pegawai yang melaksanakannya terbatas akan terjadi penumpukan pekerjaan yang hal ini akan mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atau tertunda sehingga terjadi ketidak efektifan.

Kinerja

Anwar Prabu (2004:67) pengertian kinerja yang merupakan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan secara kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya.

Menurut (Mathis dan Jacson, 2002:8) lebih lanjut memeberikan standard kinerja seseorang yang dilihat kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran ditempat kerja dan sikap kooperatif. Standar kinerja tersebut ditetapkan berdasarakan kriteria pekerjaan yaitu yang dapat menjelaskan apa-apa saja yang sudah diberikan organisasi untuk dikerjakan oleh para karyawanny,oleh karena itu kinerja individual dalam kriteria pekerjaan harus diukur, di bandingkan dengan standar yang ada dan hasilnya harus dikomunikasikan kembali dengan karyawan .

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas kecakapan, dalam usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melakanakan tugas dan tanggung jawabnya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Hasibuan, 2002 : 160)

Aparatur Desa

Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa mempunyai tugas pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sepuluh Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Sekretariat desa paling banyak terdiri atas tiga bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan peraturan menteri. Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau walikota dan perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pemerintahan Desa

Perubahan pengaturan tentang pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah membawahkan konsekuensi penting terhadap elemen dasar pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah sebuah unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai suatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal usul dan adat istiadat berlaku.

Dari defenisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Memang hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia, seperti mengentaskan rakyat miskin, mengubah wajah atau fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa, hingga memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mebgurus semua urusan pemerintahan diatur yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, parakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menagani urusan pemerrintahan dilaksanakan berdasar kan tugas, wewenan dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, berkembang sesuai dengan karakteristik kekhasan daerah.

Metode Penelitian

Berdasarkan sifat data didalam penelitian ini yaitu Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesiagaan

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur tersebut bahwa aparatur Desa memiliki kesiagaan apabila dalam proses pelayanan aparatur Desa mengalami hambatan yang merupakan keterlambatan masuk kantor atau kurangnya disiplin waktu dari aparatur Desa, dalam hal tersebut dikatakan juga oleh warga masyarakat yang merasa kurang siaga dari para aparatur Desa untuk melayani masyarakat.

Kemangkiran

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Skretaris Desa dapat diketahui bahwa aparatur desa sudah menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya mereka sesuai dengan prosedurnya akan tetapi adanya hambatan dengan kepentingan pribadi yang harus dijalani juga, dalam tersebut diungkapkan juga oleh masyarakat perwakilan dari masyarakat Desa Karya Bhakti mengatakan bahwa aparatur Desa melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, apabila mereka mau ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengisi posisi sebagai aparatur Desa yah mereka harus mementingkan kepentingan umum yaitu masyarakat membutuhkan pelayanan dan masyarakat meminta Kepala Desa menindak tegas aparatur Desa yang seringkali bolos kerja agar efektivitas kinerja aparatur desa dapat berjalan maksimal sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Semangat Kerja

Berdasarkan pernyataan diungkapkan Kaur Pembangunan menilai bahwa Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, aparatur desa memiliki kerjasama yang baik untuk melaksanakan tugasnya dan memiliki semangat kerja yang tinggi akan tetapi hal tersebut mulai berkurang karena keterlambatan gaji, dikatakan bahwa semangat kerja aparatur Desa Karya Bhakti kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajibanya selaku aparatur desa, hal tersebut dikatakana langsung oleh aparatur desa kepada penulis saat dilakukan wawancara, hal yang sama diungkapkan oleh warga masyarakat Desa Karya Bhakti bahwa efektivitas kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kurang maksimal dalam proses pelayanan.

Motivasi

Berdasarkan pernyataan yang di ungkapkan oleh Kaur Keuangan yaitu salah satu aparatur Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sebagai aparatur desa saling memotivasi antar seama aparatur desa untuk melayani masyarakat dan membangun Desa ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya, hal yang sama dikatakan oleh warga masyarakat yang merasa bahwa aparatur Desa saling memotivasi antar aparatur maupun masyarakatnya.

Kepuasan Kerja

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Kaur Umum sebagai salah satu aparatur Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur mengenai kepuasan kerja yang dilakukan oleh aparatur Desa Karya Bhakti kepada warga masyarakat, yang diketahui bahwa aparatur berusaha memberikan pelayanan yaqng terbaik kepada warga masyarakat secara maksimal dan menjadi hambatan bagi aparatur dalam proses pelayanan yaitu aparatur yang sesekali bolos kerja, dan juga ada beberapa perwakilan dari

masyarakat yang merasa kurang puas dalam proses pelayanan yang dilakukan aparaturnya karena aparaturnya sering mangkir atau bolos kerja.

Beban Kerja

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Kaur Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, dapat diketahui bahwa para aparaturnya merasa terbebani dengan keterlambatan gaji sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal yang sama diungkapkan oleh warga masyarakat Desa Karya Bhakti karena aparaturnya sering mengeluhkan hal tersebut kepada masyarakat.

Waktu

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh dengan aparaturnya Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur bagian Kaur Pembangunan dan Kaur Kesejahteraan Sosial, dapat diketahui bahwa para aparaturnya memiliki patokan waktu dalam mengerjakan tugas sesuai prosedur yang ada apabila terdapat hambatan dalam proses pelayanan dikarenakan aparaturnya yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, dan berdasarkan ungkapan yang disampaikan perwakilan dari beberapa warga masyarakat yang merasa bahwa dalam proses pelayanan harus memiliki patokan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, dan juga masyarakat berharap jangan mengesampingkan urusan pribadi sehingga hal tersebut dapat memperlambat proses pelayanan ke masyarakat dan pekerjaan kantor lainnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di lapangan yang telah penulis paparkan mengenai Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi kasus Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur). Belum Efektif hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kesiagaan dari Aparatur Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur belum maksimal atau efektif dalam menjalankan roda pemerintahan dikarenakan aparaturnya desa sering terlambat atau kurang disiplin waktu masuk kantor sehingga masyarakat menunggu aparaturnya datang untuk dilayani, dan juga hambatan yang dimana kesiagaan aparaturnya yang sesekali bingung atau kurang menguasai skill dalam bidangnya untuk melayani warga masyarakatnya .
2. Kemangkiran Aparatur Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur belum maksimal atau efektif dalam menjalankan tugasnya masih banyak yang melakukan mangkir atau bolos kerja, bagaimana efektivitas kinerja aparaturnya desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik kalau aparaturnya desa masih sering bolos kerja.

3. Semangat Kerja Aparatur Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur belum maksimal atau efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, akan tetapi Aparatur Desa memiliki kerja sama yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya mereka memiliki hambatan yang mulai kelihatan dengan adanya aparatur desa yang sesekali bolos bekerja dikarena mencari sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, selama menjadi aparatur desa gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan, dalam hal ini yang membuat semangat kerja mulai berkurang
4. Motivasi dalam hal ini Aparatur Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur mulai efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena aparatur Desa selama ini memiliki motivasi yang cukup baik antar sesama aparatur maupun warga, selalu memberikan masukan kepada rekan kerja apabila ada kendala dalam proses pelayanan kepada warga masyarakatnya, dan Aparatur Desa memiliki patokan waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya
5. Kepuasan Kerja Aparatur Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur belum efektif dikarenakan masyarakat merasa kurang puas karena mereka lambat dalam proses pelayanan kepada kami selaku warga masyarakat seharusnya pelayanan bisa dilakukan sebentar ini malah sebaliknya menjadi lama dan juga aparatur Desa masih sering bolos kerja atau melalaikan tugas dan tanggung jawabnya .
6. Beban kerja Aparatur Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur belum efektif dikarenakan beban pekerjaan yang ditanggung oleh aparatur dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus cepat selesai urusannya, sedangkan pemerintah terhambat oleh gaji yang didapat, dalam hal ini mangkir atau bolos kerja karena mengurus kebun dan hasilnya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari
7. Waktu, Aparatur Desa belum efektif mengerjakan segala sesuatu kegiatan yang bersifat untuk melayani warga masyarakat, Aparatur Desa harus memiliki patokan waktu dalam bekerja agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, dan apa yang dibutuhkan warga masyarakat dapat terlaksanakan dengan cepat dan akurat dan juga warga masyarakat berharap kepada para aparatur Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur selalu bekerja sesuai dengan prosedur yang ada jangan mementingkan kepentingan pribadi atau melalaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan dengan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Kinerja Aparatur Desa Karya Bhakti dalam bentuk kesiagaan yang kurang maksimal diberikan punishment, mangkir atau bolos kerja dapat

diberikan punishment, semangat kerja yang kurang dalam proses pelayanan kepada masyarakat sekiranya diberikan punishment, kepuasan kerja yang diberikan kepada masyarakat masih kurang maksimal akan diberikan punishment, Beban pekerjaan masih sangat kurang sebagai pelayan masyarakat akan diberikan pelatihan agar menutupi semua kekurangan tersebut, Waktu dalam hal ini Kepala Desa harus membuat aturan penetapan jam masuk dan jam pulang kerja. Dari beberapa indikator diatas yang berupa punishment.

2. Aparatur Desa yang memiliki motivasi adalah aparatur yang dapat memberikan contoh kepada sesama aparatur desa dan masyarakat karena hal tersebut untuk kepentingan bersama dalam hal ini aparatur dapat diberikan reward

Daftar Pustaka

- Sedarmayanti, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2014. *Restrukturisasi dan pemberdayaan organisasi*. Bandung; Refika Aditama.
- Sedarmayanti, 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.
- Steers, Richard M, 1998, *Efektivitas Organisasi, Terjemahan*, Jakarta, PPM, Erlangga.
- A.Anwar Prabu Mangkunegara (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Remaja Rosdakarya*, Bandung.
- Hasibuan, Malayu SP. 2002. *Manajemen Personalialia, Bina Kawan Club*, Yogyakarta
- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat

Dokumen – Dokumen

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa

Sumber Internet

- <https://anzdoc.com/organizational-psychology-belmont-california-wadsworth-inc.html>
- <http://amuntai-ilmu.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-efektivitas-dan-sumbernya.html>